

PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

IMPROVING FAMILY ECONOMIC WELL-BEING THROUGH WOMEN'S EMPOWERMENT

Hari Susanto¹, Ratih Dwi Anggraini²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

Abstrak. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-programnya yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan dan pemberian program bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya melalui pemberdayaan disertai fasilitas pendukungnya. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan mampu memberikan kesadaran kepada setiap individu untuk berperanserta pada peningkatan ekonomi untuk melangsungkan kehidupan masa depannya dalam keseharian. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk menaikkan tingkat perekonomian daerahnya. Harapannya, mampu menaikkan upah minimum kabupaten (UMK), sehingga peran serta pemerintah dan masyarakatnya harus dipacu agar supaya masyarakatnya mampu mendapatkan sumber ekonominya dengan cara bekerja, berwirausaha serta menciptakan usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang nantinya berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, dan kontribusi PDB, diantaranya mencakup bidang kuliner, fashion. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan, penyuluhan serta pendidikan lainnya terkait peningkatan ekonomi masyarakat keluarga dengan melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mentransformasi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya menjadi kekuatan masyarakat yang nyata, memperjuangkan nilai dan kepentingan dalam segala aspek kehidupan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk penguatan individu, juga penguatan kelembagaan sosial. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 10 November 2025.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Ekonomi.

Abstract. The government employs various methods to boost the local economy through programs designed to help meet daily needs. These programs aim to improve the quality of human resources through empowerment and the provision

of supporting facilities. It is hoped that community empowerment will raise awareness among individuals to participate in economic development, thereby securing their future livelihoods. The government and the community are working together to raise the region's economic level. The hope is to raise the district minimum wage (UMK), so the participation of the government and the community must be encouraged so that the community can secure their economic livelihoods through employment, entrepreneurship, and the creation of UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), which will play a role in job creation, equitable development, and GDP contribution, including in the culinary and fashion sectors. To this end, community empowerment is necessary, encompassing training, outreach, and other educational initiatives related to improving household economic conditions, with the active involvement of women. Community empowerment is an effort to transform community economic growth into a tangible source of strength, advocating for values and interests across all aspects of life, and enhancing community self-reliance. Community empowerment aims to strengthen both individuals and social institutions. The community empowerment program will take place at the Cazzanova Training Center, located in Bujuk Teni, Panji District, from October 27 to November 10, 2025.

Keywords: Community Empowerment, Economic Development.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan agenda utama yaitu memberantas kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia bersifat multiaspek. Kemiskinan bersifat multiaspek diketahui dari dua sudut pandang sebagai berikut: pertama, dalam berbentuk kekayaan yang buruk, organisasi sosial politik, pemahaman dan disiplin yang buruk. Sementara kedua latar belakang dan hubungan perbankan dalam bentuk jaringan yang rendah (Arsyad, 2010 dalam Adim, 2024:112). Berbagai macam program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga penguatan ekonomi inklusif, namun kemiskinan tetap menjadi isu struktural yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran merupakan salah satu prioritas program pembangunan nasional. Kemiskinan sebagai masalah

bangsa merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang layak. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (Labor Force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran (Unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negaranegara sedang berkembang (Develoved Contries), akan tetapi juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju (Developing Countries). (Imanda dkk, 2023:76). Sukirno (2007:472) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang telah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Dengan kata lain jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja dan mengakibatkan pengangguran. (Kardiman, at al. 2006:64 dalam Setyaningsih dkk, 2022:361) Dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang telah dirumuskan dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional bahwa misi pembangunan nasional yaitu pembangunan bidang sosial ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan salahsatunya adalah

dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena berfokus pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat untuk keluar dari keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan (masyarakat) melalui pengembangan usaha. Seperti dinyatakan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin (dalam [https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20 kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20\(masyarakat\)%20melalui%20pengembangan](https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20 kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20(masyarakat)%20melalui%20pengembangan)) bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat hambatan utama, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perbaikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan adalah pemberian kemampuan kepada pihak yang lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural. Setidaknya ada tiga kata kuncinya dari kata Empowerment, yaitu: partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Menurut Isbandi (2003 dalam Suaib, 2024:52), menyatakan bahwa upaya pemberdayaan pada individu, keluarga maupun kelompok atau masyarakat adalah upaya pengembangan mereka dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Wasistiono (1998 dalam Suaib, 2024:35) pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu a). Pemberdayaan pada individu anggota organisasi; b). Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat; c. Pemberdayaan pada organisasi; d). Pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari sasaran dan ruang lingkup tadi, dan konteksnya maka lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat. Namun mengingat kelompok masyarakat terdiri pula dari anggota masyarakat maka dengan

sendirinya dibahas pula pemberdayaan pada individu/anggota masyarakat. Terkait pemberdayaan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa tujuan utama reformasi diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terkait dengan undang-undang ini, maka tugas pemerintah adalah melaksanakan kegiatan yang terkait pada pemberdayaan masyarakat di setiap daerah, sehingga akan menggerakkan peran serta masyarakatnya, serta peningkatan daya saing dengan mengutamakan sumberdaya alam yang dimiliki untuk dikelola, dengan demikian pengangguran dan kemiskinan akan menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03 persen. Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurang sebanyak 0,09 juta orang (dari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,40 juta orang (dari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025). (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>). Sedangkan jumlah angkatan kerja bertambah dan jumlah pengangguran menurun. Hal ini ditunjukkan bahwa Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 155,27 juta orang, naik 1,262 juta orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,95 persen, naik sebesar 0,36 persen poin dibanding Agustus 2025.

Penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebanyak 0,381 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025. (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>). Sesungguhnya terdapat keterpengaruhan tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Semakin banyak atau tinggi angka pengangguran maka akan semakin banyak atau meningkat angka kemiskinan. Wulansari et al., (2023 dalam Gulo, 2025: 300) menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan dua isu yang tak terpisahkan dan saling memengaruhi. Tingginya tingkat pengangguran secara langsung berkontribusi terhadap penurunan daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Selanjutnya Sesmita dkk. (2025:1) menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan utama yang saling berkaitan dan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta jaringan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberhasilan suatu negara diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya lapangan kerja, serta kondisi geografis yang terisolasi. Hal tersebut dinyatakan pula oleh

Suryawati (2005 dalam Ghinastri, 2024:73) bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak pada masalah kemiskinan. Dari sisi ekonomi, kemiskinan mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau individu. Ini melibatkan kurangnya pendapatan atau sumber daya ekonomi yang memadai untuk mencukupi kebutuhan makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Hasil penelitian Arifuddin, dkk (2023:17-18) mengungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Masyarakat. Selanjutnya Padang & Murtala (2019:9) menyatakan selain kemiskinan, pengangguran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam sudut pandang makroekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Dampak tingginya tingkat pengangguran akan banyaknya sumber daya sia-sia dan pendapatan masyarakat dapat berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan jumlah kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perkapita, dan menaikkan jumlah permintaan dan penawaran. Secara teoretis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan (Ishak et al., 2020). Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan di masyarakat, yang berakibat kemiskinan semakin sulit untuk diatasi. Jumlah pengangguran dan kemiskinan pada suatu daerah berpengaruh pada upah yang diterima daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah upah minimum kabupaten atau dapat dikatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi yang erat dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tingginya pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan memicu kemiskinan. Sementara itu,

penetapan UMK yang berlebihan justru dapat membatasi penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran (dalam Ghinastri, 2024:76). Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Penjelasan ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi penyerapan tenaga kerja akan menentukan berapa besar UMK suatu daerah. Semakin meningkat jumlah pengangguran dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada besar kecilnya UMK daerah tersebut. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (gubernur) untuk setiap kabupaten atau kota di suatu provinsi. Penjelasan di atas menyatakan bahwa terjadi perbedaan pada besarnya UMK di tiap-tiap wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. UMK Jawa Timur Tahun 2026 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,09 persen atau setara Rp177.581 dibandingkan UMK Tahun 2025. Dengan demikian, rata-rata UMK Jawa Timur Tahun 2026 berada di angka Rp3.154.365. Kota Surabaya kembali menempati posisi UMK tertinggi di Jawa Timur dengan besaran Rp5.561.066,00 sementara UMK terendah tercatat di Kabupaten Situbondo sebesar

Rp2.580.449,00.(Sumber:https://ekonomi.bisnis.com/read/20251103/12/1925560/daftar-umk-jawa-timur-2026-jika-naik-105-surabaya-tertinggi-situbondo-terendah#goog_rewarded). Upaya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah melalui berbagai macam pemberdayaan masyarakat (society empowerment), dengan harapan akan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat serta

akan mengurangi jumlah pengangguran. Saat sekarang ini, umumnya pemberdayaan perempuan sering dilakukan, karena kaum perempuan banyak waktu di rumah, sedangkan para lelaki banyak yang mempunyai kegiatan di luar rumah. Di sisi lain, kebanyakan kaum perempuan lebih banyak mengetahui kebutuhan rumahtangnya. Pemerintah mengeluarkan program-program khususnya untuk perempuan, salah satu tujuannya untuk membantu perempuan di desa atau perkotaan agar menjadi manusia mandiri perekonomiannya. Program yang ditindaklanjuti berupa pelatihan kewirausahaan (UMKM) dan akselerasi ke sumberdaya dengan harapan memulai usaha mereka sendiri untuk mencari nafkah atau penghasilan sehari-hari. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi untuk membuat keputusan yang agar menghasilkan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010 dalam https://www.researchgate.net/publication/362252947_Model_Pemberdayaan_Pemempuan#pf39). Badan Pusat Statistik RI tahun 2026 tentang Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia jumlah perempuan lebih sedikit dari kaum laki-laki, dengan posisi angka 144.864 (50,44%) untuk laki-laki

dan 142.334,3 (49,56%) dari jumlah total sebesar 287.198,4 orang. Sedangkan BPS Situbondo tahun 2026 menyebutkan bahwa Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2025 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk sebanyak 694,76 ribu jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 339.86 ribu jiwa (48,92%) dan perempuan sebanyak 354.90 ribu jiwa (51,08%). Di Situbondo telah menunjukkan bahwa populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Data tersebut menunjukkan populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga hal yang sangat bagus, apabila mereka mendapatkan lapangan kerja untuk membantu perekonomian keluarga, di antaranya dengan melakukan pemberdayaan, pelatihan, dan penyuluhan sehingga bisa bekerja dengan melalui UMKM dan lain sebagainya. Dalam hal angkatan kerja di Situbondo, laki-laki yang bekerja sebanyak 238.708 jiwa (95,56%), pengangguran terbuka sebanyak 8.495 jiwa (3,44%) dari 247.203 jiwa. Sedangkan perempuan yang bekerja sebanyak 195.009 jiwa (97,50%) dan pengangguran dengan jumlah 4.993 (2,50%) jiwa dari 200.002 jiwa. (BPS Situbondo, 2026:62). Perihal ketenagakerjaan, masih didominasi oleh laki, begitu juga pada pengangguran terbuka. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga, maka perempuan bisa turut berpartisipasi untuk menambah income keluarga. Pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kegiatan pemberdayaan ini berupa pelatihan, serta diselingi beberapa penyuluhan, salah satunya tentang peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, c) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial dan d) DPA Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

METODE

Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) khususnya untuk perempuan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha pada peningkatan sektor ekonomi. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan cara pemberian memotivasi yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan praktek langsung pada bidang industri serta pemberian bantuan modal, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kaum perempuan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk kemajuan ekonomi pada keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi pada bidang ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam upaya kemandirian ekonomi berupa transfer ilmu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan diadakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober - 10 November 2025, dengan tema Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga “Melalui Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo” yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Kerja Sama Dengan Cazzanova Training Center Tahun Anggaran 2025. Peserta kegiatan ini semuanya 10 orang perempuan terdiri dari gadis remaja dan ibu rumah tangga, serta

mendapatkan paket bantuan berupa peralatan potong rambut wanita dan uang saku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) khususnya untuk perempuan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha pada peningkatan sektor ekonomi. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan cara pemberian memotivasi yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan praktek langsung pada bidang industri serta pemberian bantuan modal, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kaum perempuan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk kemajuan ekonomi pada keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi pada bidang ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam upaya kemandirian ekonomi berupa transfer ilmu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan diadakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober - 10 November 2025, dengan tema Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga “Melalui Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo” yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Kerja Sama Dengan Cazzanova Training Center Tahun Anggaran 2025. Peserta kegiatan ini semuanya 10 orang perempuan terdiri dari gadis remaja dan ibu rumah tangga, serta mendapatkan paket bantuan berupa peralatan potong rambut wanita dan uang saku.

HASIL DAN PEMBAHASAN Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program-program tersebut di antaranya adalah Program bantuan tunai bersyarat seperti PKH dan BLT Kesra, Bantuan permodalan seperti Ultra Mikro (UMi), Program pemberdayaan ekonomi seperti UPPKS dan gerakan keluarga berdaya, Pemberdayaan UKM, Industri rumah tangga, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pada kaum perempuan bentuk kegiatannya dapat berupa pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan pemberdayaan para peserta mendapatkan modal, bantuan alat produksi dan peralatan lainnya guna mendukung kegiatan usaha untuk mendapatkan biaya/ongkos jasa. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji, pelatihan keterampilan salon pada The Cuts Community Situbondo serta pemberian paket peralatan potong rambut wanita bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai. Peserta kegiatan pelatihan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang kesemuanya adalah perempuan, dimana mereka semua dari Komunitas The Cuts Community Situbondo. Instruktur Pelatihan dari Cazzanova Training Center, terdiri dari Mohammad Hazan, Ratu Maulika Balqis serta dibantu asistennya bernama Bintang Mustika Ratu dan Moh. Fengki. Narasumber untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya berasal dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini yang dilaksanakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga, secara umum akan menumbuhkembangkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan berbagai macam bentuknya, di antaranya berupa pendidikan dan pelatihan, workshop, pemberian bantuan modal, bantuan alat produksi. Untuk kegiatan pemberdayaan di Komunitas The Cuts Community Situbondo yang

diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, para peserta mendapatkan bantuan transport sebesar Rp.50.000,00/hari. Selanjutnya masing-masing peserta diberi peralatan untuk potong rambut dan kecantikan. Keluaran (out put) dari pemberdayaan ini, diharapkan mereka yang telah mendapatkan pelatihan potong rambut dan kecantikan ini bisa dapat mandiri untuk menambah atau meningkatkan ekonomi keluarga melalui mindset/attitude kewirausahaan maupun membuka UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Data menunjukkan bahwa terdapat 3.818 UMKM yang terdata di Kabupaten Situbondo, tentu hal ini memiliki potensi UMKM yang besar dan beragam mulai dari kerajinan, makanan dan minuman dan beberapa industri kecil lainnya. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat bergerak di hampir semua sektor ekonomi. Kategori utamanya meliputi kuliner, fesyen, agribisnis, perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Usaha ini dikelompokkan berdasarkan omzet tahunan atau jumlah modal. Kegiatan di Cazzanova Training Center UMKM bertujuan agar setelah melakukan pelatihan, peserta akan berpikir dan melaksanakan kegiatan bisnis untuk menambah income keluarga, maksudnya dapat mencari uang melalui hasil pelatihan yang berhubungan dengan perawatan atau layanan yang berfokus pada kecantikan. Di antaranya adalah perawatan atau pangkas rambut, make up, kecantikan. Harapannya adalah mereka diharapkan akan membuka kios atau tempat usaha di bidang perawatan rambut dan kecantikan, dengan demikian akan mendapat penghasilan dari usaha tersebut. UMKM di Situbondo memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di Situbondo, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ada 13.818 UMKM yang terdata di Kabupaten Situbondo, tentu hal ini memiliki potensi

UMKM yang besar dan beragam. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti halnya yang telah diprakarsai oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun Badan Latihan Kerja atau tempat-tempat magang seperti Cazzanova Training Center dengan Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo, maka nantinya akan muncul jiwa, mindset dan perilaku kewirausahaan bagi para pesertanya. Terbentuknya entrepreneur mindset bagi perempuan merupakan salah satu hasil dari pelatihan sehingga pesertanya akan berdaya, dampak lainnya adalah muncul kemampuan untuk bisa lebih mandiri. Pemberdayaan adalah upaya memberi kemampuan khususnya juga pada perempuan agar mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga dapat mengatur dirinya serta dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dirinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya para perempuan sangat diperlukan guna kemandirian dalam peningkatan ekonomi keluarga dengan melalui pengelolaan sumberdaya yang ada dalam dirinya. Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan yang difasilitasi dinas maupun perguruan tinggi, diharapkan terjadinya sinergitas untuk menguatkan kemandirian para ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan khususnya sektor peningkatan ekonomi keluarga di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan gender, kemandirian organisasi perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak, salah satunya seperti pelatihan potong

rambut dan perawatannya di Cazzanova Training Center. Pemberdayaan perempuan akan lebih optimal apabila mampu secara mandiri dalam mengelola potensi pengembangan sumberdaya manusianya seperti perawatan atau layanan yang berfokus pada kecantikan, di antaranya adalah perawatan atau pangkas rambut, make up, kecantikan. dengan dilandasi jiwa kewirausahaan lalu diterapkan dengan membuka salon/tempat pangkas rambut dan kecantikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 2. Dr. Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CIQaR. selaku Kepala LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fisip Unars Situbondo 4. Ir. H. Timbul Surjanto, M.M, Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo. 5. Mohammad Hazan selaku instruktur dan pemilik Cazzanova Training Center Bujukteni Panji serta instruktur Ratu Maulika Balqis,

DAFTAR PUSTAKA

- (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>)
- Adim, Abd. 2024. Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018-2022. IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science, Vol 5 No 2 November 2024. E-ISSN: 2798-0413,P-ISSN :2798-0111
- Arifuddin, Ade Ariswildani, Rukmawaty Muta'al, Hamka Amir. 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. Vol. 1 No. 1 tahun 2023
- BPS Situbondo, 2026

- Ghinastri, S. L & Syafitri, W. 2024. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (MK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 03, Number 1, Pages 72-83. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.6>
- Gulo, Juniasti. 2025. Identifikasi Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Linier Berganda. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*. Volume.4, Nomor. 2 Mei 2025. Demak: Pusat Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga Pengembaga Kinerja Dosen (LPKD).
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>
- <https://www.instagram.com/reel/DSrjP8VgSH/?hl=id>
- [https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20\(masyarakat\)%20melalui%20pengembangan](https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20(masyarakat)%20melalui%20pengembangan)
- Imanda, Deanisa Dwi. Reva Putri Nurlatifah, Nabila Yuliana, Lina Marlin. 2023. Pengaruh Pengangguran Dan Pembangunan Nasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Of Economis and Business*. Vol. 1 No. 2 Desember 2023, 74-84.
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Padang, Lidyawati dan Murtala. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Volume VIII Nomor 02 Desember 2019. Universitas Malikussaleh
- Sesmita, Reni. Wiwit Tri Nolya. Yusi Marsa Heriyandini. Yosi Lara Jenita. 2025. Faktor Penyebab Pengangguran dan Kemiskinan serta Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Vol. 1 No. 8 (2025): Menulis: *Jurnal Penelitian Nusantara*. Published By : PT. Padang Tekno Corp. Kab. Asahan, Sumatera Utara

Setyaningsih, Hana, Endah Vestikowati, Erlan Suwarlan. 2022. Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten Ciamis Tahun 2021. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 1 Januari- Juni 2022.

Suaib dan Aryulhandy Nur Zulhijjah.2024. *Pembangunan Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Inteligencia Media

Sukirno, Sadono. 2007. *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional

Zakiyah, 2010 dalam https://www.researchgate.net/publication/362252947_Model_Pemberdayaan_Perempuan#pf39).